

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN KENDAL MENURUT PENGELUARAN

2020-2024

Volume 9, 2025



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KENDAL**

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN KENDAL MENURUT PENGELUARAN

2020-2024

Volume 9, 2025

<https://kendalkab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KENDAL**



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN KENDAL
MENURUT PENGELUARAN 2020-2024
Volume 9, 2025**

Katalog: 9302020.3324
Nomor Publikasi: 33240.25003

Ukuran Buku: 21 cm x 29,7 cm
Jumlah halaman: xiv + 78 halaman

Penyusun Naskah:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal

Penyunting:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal

Pembuat Cover:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal

Penerbit:
©Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal

Sumber Ilustrasi:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik



TIM PENYUSUN

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN KENDAL MENURUT PENGELUARAN 2020-2024 Volume 9, 2025

Pengarah:

Ade Sandi Parwoto

Penanggung Jawab:

Yupensius Sumardi

Penyunting:

Erya Indy Primatasari

Pengolah Data dan Penulis Naskah:

Yupensius Sumardi

Eli Sufiati

Zuliya Ismawati

Penata Letak:

Oktya Putri Gitaningtyas

Gambar Kulit:

Meyrina Tri Astuti



KATA PENGANTAR

Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kendal Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2024 ini merupakan kelanjutan dari penerbitan tahun-tahun sebelumnya yang disusun oleh BPS Kabupaten Kendal. Publikasi ini menyajikan tinjauan perkembangan perekonomian Kendal secara deskriptif. Dalam buku ini juga ditampilkan tabulasi dan infografis PDRB tahun 2020-2024 atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2010. Data PDRB dalam publikasi ini menggunakan tahun dasar 2010, serta menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kami mengucapkan terimakasih kepada tim penyusun yang telah mewujudkan publikasi PDRB menurut pengeluaran ini. Kami menyadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Kendal, April 2025
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Kendal,

Ade Sandi Parwoto



DAFTAR ISI

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN KENDAL MENURUT PENGELUARAN 2020-2024 Volume 9, 2025

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	4
1.3 Kegunaan Statistik PDRB.....	8
BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	9
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PKRT)	11
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT (PKLNPRT)	14
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PKP)	17
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	20
2.5 Perubahan Inventori	25
2.6 Ekspor Impor Barang dan Jasa	29
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN KENDAL BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN TAHUN 2020-2024	31
3.1 Tinjauan Agregat PDRB Kabupaten Kendal menurut Pengeluaran.....	33



3.2	Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	40
3.3	Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	45
3.4	Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah	47
3.5	Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	48
3.6	Perkembangan Perubahan Inventori	50
3.7	Perkembangan Ekspor Netto Barang dan Jasa	51
BAB IV	PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN	
	KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020-2024	55
4.1	PDRB Kabupaten Kendal	57
4.2	Struktur Perekonomian	57
4.3	Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PMTB	60
4.4	Proporsi Konsumsi Akhir Terhadap PDRB	61
4.5	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR)	62
BAB V	PENUTUP	65
	DAFTAR PUSTAKA	69
	LAMPIRAN	71



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (miliar rupiah), 2020-2024.....	34
3.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (miliar rupiah), 2020-2024.....	34
3.3 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (persen), 2020-2024.....	36
3.4 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (persen), 2020-2024.....	38
3.5 Indeks Harga Implisit PDRB Menurut Pengeluaran (persen), 2020-2024.....	40
3.6 Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga, 2020-2024.....	41
3.7 Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga (persen), 2020-2024.....	42
3.8 Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga (persen), 2020-2024.....	44
3.9 Pertumbuhan Indeks Implisit Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga (persen), 2020-2024.....	45
3.10 Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT, 2020-2024	46
3.11 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah, 2020-2024.....	47
3.12 Perkembangan dan Struktur PMTB, 2020-2024	50
3.13 Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori, 2020-2024	51
3.14 Perkembangan Ekspor Netto, 2020-2024	53



4.1	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB, 2020-2024.....	61
4.2	Proporsi Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB, 2020-2024.....	62
4.3	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR), 2020-2024.....	63

<https://kendalkab.bps.go.id>



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Perbandingan PDRB ADHB dan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran (triliun rupiah), 2020-2024.....	35
3.2 Perbandingan Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran di Kabupaten Kendal (persen), 2020-2024	37
3.3 Pertumbuhan Beberapa Komponen Pengeluaran di Kabupaten Kendal (persen), 2020-2024	49
4.1 Kontribusi dan Pertumbuhan Komponen PDRB Menurut Pengeluaran di Kabupaten Kendal (persen), 2024	58
4.2 Perbandingan Pertumbuhan Komponen PDRB Menurut Pengeluaran di Kabupaten Kendal (persen), 2023-2024	59
4.3 Rata-rata Pertumbuhan Komponen PDRB Menurut Pengeluaran di Kabupaten Kendal (persen), 2020-2024.....	60



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kendal Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (miliar rupiah), 2020-2024	73
2.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kendal Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (miliar rupiah), 2020-2024.....	74
3.	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kendal Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (persen), 2020-2024.....	75
4.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kendal Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (persen), 2020-2024.....	76
5.	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kendal Menurut Pengeluaran, 2020-2024.....	77
6.	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (Tahun 2010=100) Kabupaten Kendal Menurut Pengeluaran (persen), 2020-2024	78



PENDAHULUAN



Pendahuluan

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah/daerah/*region* tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan produksi dan pendekatan pengeluaran. Penghitungan PDRB dengan pendekatan produksi diperoleh dari selisih nilai barang dan jasa yang dihasilkan dari suatu aktivitas ekonomi, dikurangi dengan bahan baku yang digunakan sebagai input, ditambah pajak atas produk, serta dikurangi subsidi atas produk. PDRB dengan pendekatan produksi ini lebih dikenal dengan istilah PDRB menurut lapangan usaha. PDRB menurut lapangan usaha merupakan gambaran kondisi sisi penawaran (*supply side*) dari suatu ekonomi yang dibedakan menurut beberapa kategori lapangan usaha. Berbeda dengan PDRB sebelumnya, penghitungan PDRB dengan metode baru (SNA 2008), juga telah “merubah” cakupan dan beberapa istilah yang digunakan. Misalnya saja, istilah sektor sekarang diganti menjadi kategori, cakupan yang sebelumnya hanya 9 sektor, sekarang berubah menjadi 17 kategori lapangan usaha.

Sejalan dengan pendekatan produksi, gambaran perekonomian dari sisi permintaan (*demand side*) sudah seharusnya juga tersedia. Gambaran struktur ekonomi dari sisi permintan ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penghitungan PDRB menurut pendekatan pengeluaran. Melalui pendekatan pengeluaran, PDRB diperoleh dari penjumlahan seluruh pengeluaran barang dan



jasa untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, dan ekspor dikurangi impor barang dan jasa. Selain untuk melihat pertumbuhan ekonomi, PDRB menurut penggunaan juga memperlihatkan komposisi penggunaan/permintaan barang dan jasa, baik yang dihasilkan di dalam atau dari luar wilayah dalam periode tahun tertentu untuk memenuhi permintaan.

Menyadari bahwa penghitungan PDRB dengan menggunakan kedua pendekatan sama pentingnya, maka BPS Kabupaten Kendal melakukan penghitungan PDRB menurut pengeluaran. Penghitungan dilakukan dengan menggunakan tahun dasar (seri 2010), sesuai dengan rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of National Accounts* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT).

1.2 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto atau balas jasa faktor produksi yang dihasilkan di suatu wilayah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. Penyusunan PDB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal merupakan angka yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan. Secara konseptual, PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur perekonomian di suatu wilayah. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan atau dikenal dengan PDRB riil menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang disusun berdasarkan harga pada tahun dasar tertentu. PDRB atas dasar harga konstan dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dari suatu periode ke periode tertentu.



Terdapat tiga pendekatan yang bisa digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran.

1. Pendekatan Produksi

PDRB menurut pendekatan produksi adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah/daerah/*region* dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan ke dalam beberapa sektor lapangan usaha. Mulai tahun 2015, sebagaimana rekomendasi SNA 2008, pengelompokan sektor lapangan usaha diperluas menjadi 17 kategori lapangan usaha yang dirinci menjadi sub-sub kategori lapangan usaha, yaitu:

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan,
2. Pertambangan dan Penggalian,
3. Industri Pengolahan,
4. Pengadaan Listrik dan Gas,
5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang,
6. Konstruksi,
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor,
8. Transportasi dan Pergudangan,
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum,
10. Informasi dan Komunikasi,
11. Jasa Keuangan dan Asuransi,
12. Real Estat,
13. Jasa Perusahaan,
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib,
15. Jasa Pendidikan,
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial,
17. Jasa lainnya.



2. Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah/daerah/*region* dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

3. Pendekatan Pengeluaran

PDRB menurut penggunaan disebut juga sebagai PDRB menurut permintaan atau PDRB menurut pengeluaran. Penghitungan PDRB menurut penggunaan menggambarkan bagaimana penggunaan barang dan jasa yang diproduksi oleh berbagai golongan dalam masyarakat. Barang dan jasa yang dimaksud merupakan seluruh barang jadi dan jasa yang diproduksi di suatu daerah/wilayah selama periode waktu tertentu, yang digunakan untuk konsumsi akhir. Yang dimaksud dengan barang jadi adalah barang yang tidak digunakan untuk diproses kembali oleh suatu industri, tetapi untuk dikonsumsi oleh penduduk. Barang setengah jadi (*intermediate goods*) tidak termasuk dalam penghitungan PDRB menurut penggunaan, karena barang setengah jadi digunakan untuk diproses kembali menjadi barang jadi. Oleh karena itu, nilai barang setengah jadi tersebut sudah termasuk di dalam barang jadi yang dihasilkan.

Dari sisi pengeluaran, besaran PDRB tersusun dari tiga komponen utama, pertama adalah besaran konsumsi, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga, konsumsi akhir pemerintah, serta konsumsi akhir lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga; kedua adalah pembentukan modal tetap bruto, dan ketiga adalah net ekspor, yaitu besarnya ekspor dikurangi dengan impornya. Secara lebih detail, PDRB dari sisi pengeluaran, terdiri dari enam komponen berikut ini:



1. Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga
2. Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga
3. Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Perubahan Inventori
6. Ekspor Neto (ekspor minus impor)

Secara teoritis, total PDRB yang dihitung melalui ketiga pendekatan di atas akan menghasilkan nilai yang sama besar. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tidak langsung neto. Penghitungan PDRB melalui pendekatan produksi dan atau pendekatan pendapatan akan disajikan dalam bentuk data *PDRB menurut Lapangan Usaha*, sedangkan melalui pendekatan pengeluaran disajikan dalam bentuk data *PDRB menurut Penggunaan*. Sebagaimana judulnya, publikasi ini membahas PDRB pengeluaran dengan menggunakan tahun dasar baru (2010) agar dapat mencerminkan struktur ekonomi terkini secara lebih baik.



2

METODE ESTIMASI & SUMBER DATA

<http://indakab.bps.go.id>



2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA (PKRT)

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh institusi lain.

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama.

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (*United Nations*), sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alas kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan



8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka dalam penyajian di publikasi ini, 12 (dua belas) COICOP tersebut dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);
- Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen di luar wilayah atau di luar negeri (diperlakukan sebagai impor)



Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut)
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah:

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun dari BPS,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).
- Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk menghasilkan perhitungan PKRT yang mencerminkan kondisi sesungguhnya, masih diperlukan adanya beberapa penyesuaian (*adjustment*). Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan data pendukung (data sekunder) dalam bentuk indikator suplai (di luar Susenas) dari beberapa komoditi tertentu. Hasil penghitungan dari data sekunder tersebut dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya.



Penyesuaian (*adjustment*) yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan data indikator suplai untuk beberapa komoditas. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu.

Langkah penghitungan di atas, menghasilkan besarnya PKRT ADH Berlaku. PKRT ADH Konstan 2010, diperoleh dengan cara men-*deflate* PKRT ADH Berlaku dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sbb:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - a. Makanan = pengeluaran konsumsi per kapita seminggu x (30/7) x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi per kapita sebulan x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Terhadap data poin ke 1 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas untuk jenis pengeluaran tertentu;
3. Data poin ke 2 dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) kelompok COICOP,
4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-*adjust*;
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat) dan 7 kelompok COICOP ;
6. PKRT ADH Konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT (PKLNPRT)

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumah tangga



secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tidak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

Karakteristik unit LNP adalah sebagai berikut:

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud di sini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 (tujuh) jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

Nilai Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PKLNPRT) sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:



- a. Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis, barang cetakan; pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dan lain-lain.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dan lain-lain.

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKLNPRRT adalah :

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SKLNP).
- Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *up-dating* direktori LNPRT.
- Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

PKLNPRRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil Survei Khusus Lembaga Non Profit (SKLNP). Tahapan estimasi PKLNPRRT adalah sebagai berikut :

- a. Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenisnya dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$



$\bar{x}_{ij}$: Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PKLNPRRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- b. Mengestimasi PKLNPRRT, dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PKLNPRRT ADH Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PKLNPRRT ADH Berlaku. PKLNPRRT ADH Konstan 2010, diperoleh dengan cara men-*deflate* PKLNPRRT ADH Berlaku dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PKP)

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.



Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang dan jasa maupun aktivitas investasi.

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PKP mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut:

- a. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
- b. Memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit



pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Kabupaten mencakup PK-Pemerintah Provinsi yang merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten; PK-Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan; PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Kabupaten; dan PK-Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Kabupaten bersangkutan.

2. Metode Penghitungan

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Kabupaten Tahunan adalah:

- Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
- Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- Output Bank Indonesia (BI)
- Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementrian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

a. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Kabupaten ADH Berlaku

Secara umum, PK-P ADH Berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut:

$$\text{PK-P ADH Berlaku} = \text{Output non pasar-penjualan barang dan jasa} + \text{Output Bank Indonesia}$$

Output non-pasar dihitung dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan, yaitu: Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level Kabupaten, PK-P Kabupaten ADH Berlaku dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Kabupaten itu sendiri + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang



ada di wilayah kabupaten tersebut + pengeluaran pemerintah Pusat yang menjadi bagian dari kabupaten yang bersangkutan.

b. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Kabupaten ADH Konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah ADH Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi di sini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang



modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

PMTB terdiri dari:

- a. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;
- b. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
- c. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti overhaul mesin produksi; reklamasi pantai; pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan; serta pencegahan banjir dan erosi).

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PMTB adalah :

- Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.
- Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
- Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil dan Rumah tangga (level provinsi).
- Laporan keuangan perusahaan.
- Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.



- IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
- Publikasi Statistik Listrik, Gas dan Air Minum.
- Publikasi Statistik Konstruksi.
- Data Eksplorasi Mineral dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “supply” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi



informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai ADH Berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB ADH Konstan, maka PMTB ADH Berlaku tersebut di “deflate” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik ADH Berlaku maupun ADH Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB ADH Berlaku. Untuk memperoleh nilai ADH Konstan adalah dengan men-deflate PMTB (ADH Berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikan PMTB ADH Konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB ADH Konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB ADH Berlaku, nilai PMTB ADH Konstan tersebut di “reflate” (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB ADH Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.



Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB ADH Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rincian tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). **Kedua**, untuk memperoleh PMTB ADH Konstan adalah dengan cara men-*deflate* PMTB ADH Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB ADH Berlaku untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan ADH Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB ADH Konstannya diperoleh dengan men-*deflate* nilai ADH Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunannya.

Untuk perangkat lunak, PMTB ADH Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk ADH Konstan diperoleh dengan men-*deflate* nilai ADH Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data yang dikumpulkan antara lain nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB ADH Konstannya diperoleh dengan cara men-*deflate* nilai ADH Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung



- statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
 - c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5 PERUBAHAN INVENTORI

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, disamping tenaga kerja dan barang modal. Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Tetap Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang mempunyai nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna pertambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk



bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga, pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sebagai berikut :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku dan penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.



2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah:

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait, dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD;
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalan;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang;
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian.

Terdapat 2 (dua) metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Dilihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori ADH Berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang



berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut:

- menghitung posisi inventori ADH Konstan, dengan cara men-*deflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori ADH Konstan dengan mengurangi posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori ADH Berlaku dengan meng-*inflate* perubahan inventori ADH Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori ADH Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan, bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori ADH Konstan dihitung dengan: a. men-*deflate* nilai perubahan inventori ADH Berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah:

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara me-*mark-up*, untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia.



2.6 EKSPOR IMPOR BARANG DAN JASA

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

Ekspor-Impor pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi/kab/kota tersebut;
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi/kab/kota tersebut
Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya
- c. Net Ekspor antar daerah
 - Ekspor antar daerah
 - Impor antar daerah

2. Metode Penghitungan



Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi ekspor impor adalah :

- Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$);
- Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$);
- Neraca Pembayaran Indonesia dari Bank Indonesia;
- Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
- Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei;
- Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia.

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board* (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu, nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented trasnsaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.



TINJAUAN PEREKONOMIAN KENDAL BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN TAHUN 2020-2024





Tinjauan Perekonomian Kendal Berdasarkan PDRB Pengeluaran Tahun 2020-2024

Perubahan struktur ekonomi Kabupaten Kendal sebagai wujud proses pembangunan ekonomi tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Kabupaten Kendal digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPR, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

3.1 TINJAUAN AGREGAT PDRB KABUPATEN KENDAL MENURUT PENGELUARAN

Nilai total PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Kendal selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 sebesar 58.836,99 miliar rupiah, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 54.364,40 miliar rupiah, selengkapnya disajikan pada Tabel 3.1.

PDRB menurut pengeluaran, selain dinilai atas harga berlaku, juga dinilai atas dasar harga konstan 2010. Perhitungan nilai PDRB ADHK 2010 menggunakan dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan perhitungan ADHK, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas atau riil (tanpa ada pengaruh perubahan harga).



Tabel 3.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (miliar rupiah), 2020-2024

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	25.246,21	26.115,63	28.699,31	31.378,72	34.157,27
2. Konsumsi LNPRT	427,22	446,44	503,40	567,02	686,40
3. Konsumsi Pemerintah	2.074,34	2.138,40	2.170,48	2.288,99	2.368,75
4. PMTB	11.760,18	12.587,74	13.443,36	14.359,06	15.768,10
5. Perubahan Inventori	447,83	408,28	511,24	553,21	426,35
6. Net Ekspor	2.630,41	3.468,31	4.334,17	5.217,40	5.430,11
PDRB PENGELUARAN	42.586,19	45.164,80	49.661,96	54.364,40	58.836,99

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

PDRB ADHK menurut pengeluaran menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara nominal, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2020–2024, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kabupaten Kendal berdasarkan PDRB ADHK dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (miliar rupiah), 2020-2024

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	17.300,93	17.581,17	18.452,18	19.486,57	20.573,18
2. Konsumsi LNPRT	268,59	271,95	285,21	312,44	367,69
3. Konsumsi Pemerintah	1.275,33	1.285,79	1.288,01	1.319,12	1.351,31
4. PMTB	7.758,58	8.220,63	8.453,12	8.956,33	9.616,53
5. Perubahan Inventori	300,08	221,45	270,63	283,29	214,28
6. Net Ekspor	3.545,52	4.051,30	4.679,80	4.929,94	5.078,45
PDRB PENGELUARAN	30.449,02	31.632,28	33.428,96	35.287,70	37.201,45

Catatan: * Angka Sementara

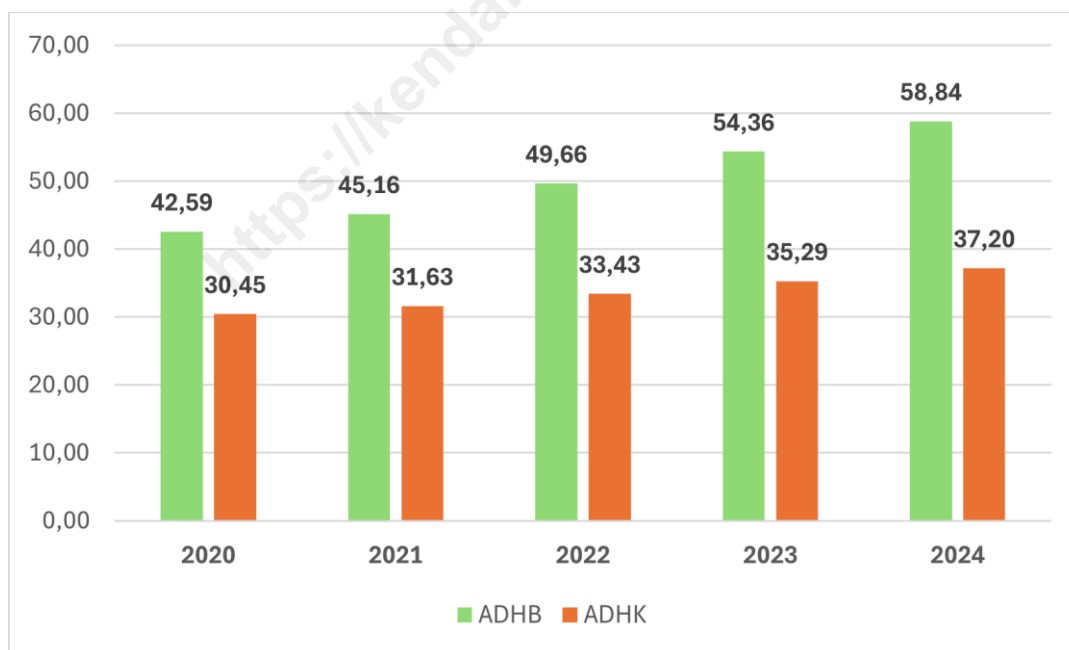
** Angka Sangat Sementara



Nilai total PDRB atas dasar harga konstan selama lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan, walaupun pada tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2024 PDRB ADHK sebesar 37.201,45 miliar rupiah, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 35.287,70 miliar rupiah.

Perekonomian Kabupaten Kendal terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK), serta pertumbuhan pada total PDRB.

Nilai PDRB Kabupaten Kendal atas dasar harga berlaku selama periode tahun 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, begitu pula dengan PDRB atas dasar harga konstan yang cenderung meningkat, walaupun pada tahun 2020 mengalami penurunan karena pandemi Covid-19 melanda yang berdampak pada penurunan kinerja ekonomi Kabupaten Kendal dan wilayah lain di Jawa Tengah. Peningkatan nilai PDRB tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume pada setiap komponen PDRB.



Gambar 3.1 Perbandingan PDRB ADHB dan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran (triliun rupiah), 2020-2024



Berdasarkan Gambar 3.1 berikut terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga berlaku lebih besar dari nilai PDRB atas dasar harga konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku, yang menggunakan harga tahun berjalan, sehingga mencerminkan kondisi nilai nominal pada tahun tersebut. Sedangkan dalam perhitungan PDRB ADHK harga yang digunakan adalah harga konstan tahun 2010, sehingga PDRB ADHK merupakan nilai riil karena pengaruh perubahan harga tidak diperhitungkan.

Total PDRB pengeluaran merupakan gabungan dari semua komponen pengeluaran yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PKRT), konsumsi akhir LNPRT (PKLNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PKP), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), perubahan inventori, dan ekspor netto (E) atau ekspor dikurangi impor.

Tabel 3.3 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (persen), 2020-2024

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	59,28	57,82	57,79	57,72	58,05
2. Konsumsi LNPRT	1,00	0,99	1,01	1,04	1,17
3. Konsumsi Pemerintah	4,87	4,73	4,37	4,21	4,03
4. PMTB	27,62	27,87	27,07	26,41	26,80
5. Perubahan Inventori	1,05	0,90	1,03	1,02	0,72
6. Net Ekspor	6,18	7,68	8,73	9,60	9,23
PDRB PENGELUARAN	100	100	100	100	100

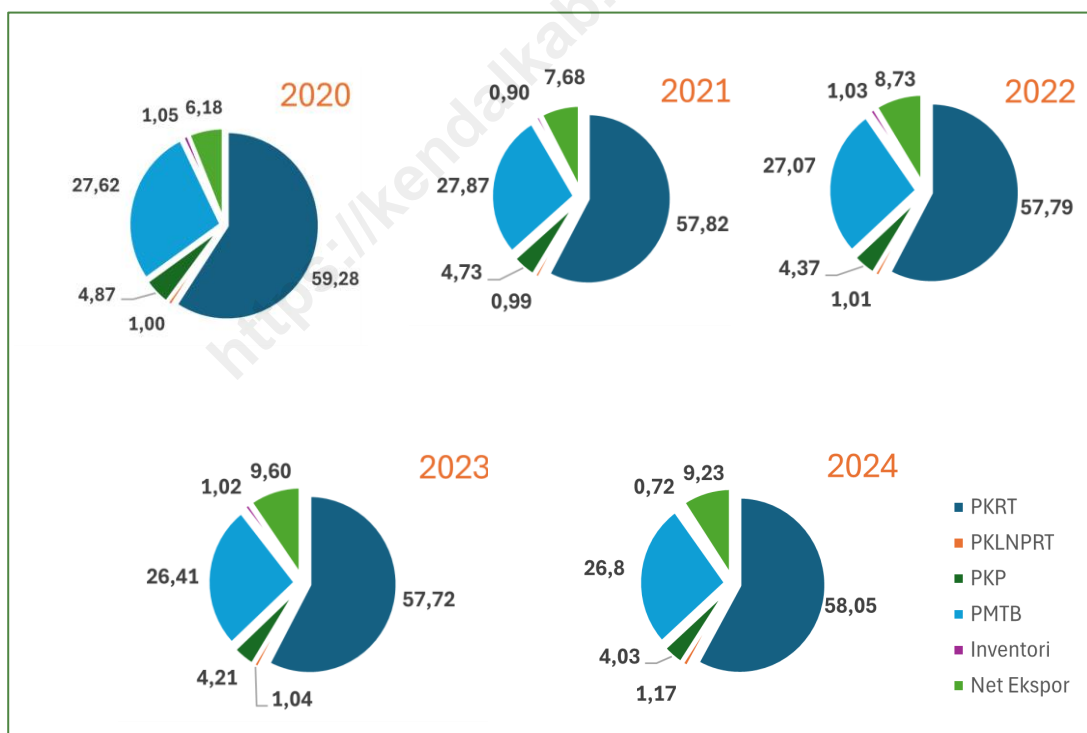
Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Berdasarkan Tabel 3.3 terlihat bahwa selama periode 2020-2024, produk yang dikonsumsi di wilayah domestik Kabupaten Kendal sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (mencapai 57 persen



lebih), artinya lebih dari separuh PDRB menurut pengeluaran tercatat sebagai pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga. Pengeluaran untuk pembentukan modal bruto (PMTB) memberi kontribusi yang cukup baik mencapai 26 hingga lebih dari 27 persen, sedangkan kontribusi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 4-5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar. Pada tahun 2020-2024, perdagangan Kabupaten Kendal yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor, menunjukkan bahwa nilai net ekspor pada kurun waktu ini masih menunjukkan posisi *"surplus"*, diindikasikan oleh nilai selisih ekspor dan impor yang positif dan memberikan kontribusi sebesar 6 hingga 10 persen selama 2020-2024. Komponen pengeluaran konsumsi LNPRT walaupun memberikan kontribusi yang kecil, namun di tahun 2024 ini kontribusinya mengalami peningkatan. Peningkatan pengeluaran konsumsi LNPRT ini terutama didorong oleh pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024.



Gambar 3.2 Perbandingan Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran di Kabupaten Kendal (persen), 2020-2024



Dari Gambar 3.2 terlihat bahwa struktur PDRB menurut komponen pengeluaran menunjukkan pola yang hampir sama selama kurun waktu 5 tahun terakhir. PDRB masih didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan kontribusi lebih dari 57 persen setiap tahunnya atau secara rata-rata sebesar 58,13 persen. Pengeluaran PMTB memberikan kontribusi terbesar kedua, dengan kontribusi lebih dari 26 persen dari tahun ke tahun atau secara rata-rata mencapai 27,15 persen.

Perubahan distribusi terjadi pada persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran LNPRT dan pengeluaran PMTB yang mengalami peningkatan. Sedangkan pengeluaran konsumsi pemerintah, perubahan inventori, dan komponen net ekspor menurun.

Tabel 3.4 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (persen), 2020-2024

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	-0,46	1,62	4,95	5,61	5,58
2. Konsumsi LNPRT	-2,19	1,25	4,87	9,55	17,68
3. Konsumsi Pemerintah	-4,13	0,82	0,17	2,42	2,44
4. PMTB	-7,01	5,96	2,83	5,95	7,37
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRB PENGELUARAN	-1,51	3,89	5,68	5,56	5,42

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal dari tahun 2020-2024 secara rata-rata mencapai 3,81 persen, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar -



1,51 persen (2020); 3,89 persen (2021); 5,68 persen (2022); 5,56 persen [2023] dan 5,42 persen (2024). Secara umum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal cukup baik sebelum pandemi Covid-19 melanda, namun harus mengalami konstaksi ekonomi sebesar -1,51 persen pada tahun 2020 karena dampak pandemi. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal mulai membaik dan mengalami peningkatan dan tumbuh positif sebesar 3,89 persen di tahun 2021, kemudian meningkat 5,68 persen pada tahun 2022.

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia akhir tahun 2019 dan mulai masuk Indonesia awal tahun 2020 yang lalu berdampak signifikan pada kinerja ekonomi Kabupaten Kendal, dimana nilai pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -1,51 persen. Penanganan pandemi Covid-19 yang gencar dilakukan dengan pemberian vaksin dosis 1, 2 dan 3 (*booster*) dengan target 70 persen penduduk berdampak pada makin menurunnya kasus Covid-19, sehingga pemulihan ekonomi perlahan namun pasti mulai menunjukkan perbaikan yang signifikan pada berbagai komponen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal meningkat pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing sebesar 3,89 persen dan 5,68 persen. Pada tahun 2023-2024 perekonomian Kabupaten Kendal terus meningkat walaupun menunjukkan adanya perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal tahun 2023 meningkat sebesar 5,56 persen namun lebih rendah dibandingkan tahun 2022. Demikian pula pada tahun 2024, perekonomian Kabupaten Kendal mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya dengan pertumbuhan ekonomi 5,42 persen.

Sementara itu, indeks implisit PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) juga menunjukkan peningkatan. Indeks implisit PDRB pada tahun 2020 sebesar 139,86 persen meningkat menjadi 158,16 persen pada tahun 2024.



**Tabel 3.5 Indeks Harga Implisit PDRB Menurut Pengeluaran (persen),
2020-2024**

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	145,92	148,54	155,34	161,03	166,03
2. Konsumsi LNPRT	159,06	164,16	176,50	181,48	186,68
3. Konsumsi Pemerintah	162,65	166,31	168,51	173,52	175,29
4. PMTB	151,58	153,12	159,03	160,32	163,97
5. Perubahan Inventori	149,24	184,37	188,91	195,28	198,97
6. Ekspor Netto	74,19	85,61	92,61	105,83	106,92
PDRB PENGELUARAN	139,86	142,78	148,56	154,06	158,16

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Data pada Tabel 3.6 menunjukkan hal tersebut, dimana sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga. Dalam kurun waktu 2020-2024 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nilai nominal (atas dasar harga berlaku) maupun riil (atas dasar harga konstan), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pada tahun 2020, ketika hampir seluruh komponen mengalami kontraksi ekonomi akibat adanya pandemic COVID-19, pengeluaran konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi terendah dibandingkan komponen lainnya hanya -0,46 persen.

Proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2020-2024 relatif stabil di angka 57 – 60 persen. Pada kurun waktu



2020-2024, kontribusi ini merupakan tertinggi diantara komponen lainnya pada PDRB Pengeluaran. Titik konstribusi tertinggi nilai konsumsi rumah tangga terjadi pada tahun 2020 sebesar 59,28 dan titik terendah terjadi pada tahun 2023 yaitu 57,72 persen.

**Tabel 3.6 Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga,
2020-2024**

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Miliar Rp)	25.246,21	26.115,63	28.699,31	31.378,72	34.157,27
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	17.300,93	17.581,17	18.452,18	19.486,57	20.573,18
Distribusi Persentase PDRB ADHB (Persen)	59,28	57,82	57,79	57,72	58,05
Laju Pertumbuhan					
Total Konsumsi RT	-0,46	1,62	4,95	5,61	5,58

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Angka proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga juga memberikan gambaran bahwa daya beli masyarakat Kabupaten Kendal mengalami fluktuasi selama periode lima tahun terakhir. Masa pemulihan ekonomi telah mendorong rumah tangga untuk memperbaiki serta mengembalikan perilaku dan kebiasaan konsumsinya setelah sekian lama mengalami masa-masa krisis. Walaupun sedikit melemah di tahun 2019, namun kembali membaik pada tahun 2020. Pandemic COVID-19 menyebabkan kebutuhan rumah tangga akan barang dan jasa kesehatan meningkat. Pada tahun 2021, angka proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga mengalami penurunan kembali menjadi 57,82 persen dibanding 2020 yang sebesar 59,28 persen. Pada tahun 2022 hingga 2023, proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga mengalami penurunan kembali menjadi 57,79 persen dan 57,72 persen. Persentase konsumsi rumah tangga meningkat pada tahun 2024 menjadi 58,05 persen.



Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan sebesar 4,68 persen pada tahun 2019. Adanya COVID-19 menyebabkan konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi hingga -0,46 persen pada 2020. Namun, pada tahun 2021 hingga tahun 2023, konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan kembali. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga menjadi sebesar 1,62 persen tahun 2021, sebesar 4,95 persen tahun 2022, dan sebesar 5,61 persen pada tahun 2023. Pertumbuhan konsumsi akhir rumah tangga pada tahun 2024 sebesar 5,58 persen, mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dapat dilihat peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara riil lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk yang umumnya sekitar 1 persen. Hal ini mengindikasikan terjadi perubahan tingkat kemakmuran masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB ini, melainkan melalui kajian khusus lainnya.

Tabel 3.7 Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga (persen), 2020-2024

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	59,28	57,82	57,79	57,72	58,05
a. Makanan dan Minuman	22,75	22,71	22,82	23,05	23,51
b. Pakaian dan Alas Kaki	2,69	2,58	2,48	2,38	2,28
c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	8,23	7,89	7,44	7,35	7,19
d. Kesehatan dan Pendidikan	3,96	3,86	3,66	3,44	3,35
e. Transportasi dan Komunikasi	15,47	14,72	15,29	15,50	15,70
f. Restoran dan Hotel	4,99	4,91	4,96	4,92	4,95
g. lainnya	1,19	1,16	1,14	1,09	1,06

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 3.7 memperlihatkan struktur penggunaan konsumsi akhir rumah tangga. Dari tabel tersebut nampak 3 (tiga) konsumsi yang peranannya paling



besar, yaitu konsumsi makanan, minuman dan rokok; konsumsi transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya; serta konsumsi perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga.

Dalam struktur penggunaan konsumsi akhir rumah tangga, konsumsi makanan dan minuman kontribusinya relatif besar dengan kecenderungan meningkat dari tahun 2020 hingga 2024, dengan kontribusi 22,75 persen tahun 2020 menjadi 23,51 persen tahun 2024. Komponen pengeluaran untuk pakaian dan alas kaki cenderung stabil di kisaran angka lebih dari 2 persen. Komponen pengeluaran untuk perumahan dan perlengkapan rumah tangga juga terlihat stabil di kisaran 7-8 persen. Demikian pula dengan komponen kesehatan dan pendidikan juga terlihat stabil di angka hampir 4 persen. Berbeda dengan komponen lainnya yang relatif stabil, untuk komponen pengeluaran konsumsi transportasi dan komunikasi mengalami penurunan menjadi 14,72 persen di tahun 2021 dari 15,47 persen di tahun 2020, kemudian meningkat pada tiga tahun terakhir menjadi 15,70 persen tahun 2024.

Pada tahun 2024, tiga besar kelompok pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, didominasi pengeluaran konsumsi makanan dan minuman 23,51 persen, pengeluaran transportasi dan komunikasi sebesar 15,70 persen dan pengeluaran untuk perumahan dan perlengkapan rumah tangga sebesar 7,19 persen. Dari ketiga kelompok konsumsi terbesar tersebut, konsumsi makanan, minuman pertumbuhannya cenderung stabil setiap tahun, sangat berbeda dengan pertumbuhan kelompok lain yang cenderung berfluktuasi di setiap tahunnya.

Pandemi Covid-19 yang melanda sejak awal tahun 2020 berdampak cukup signifikan pada kontraksi pertumbuhan komponen transportasi dan komunikasi, serta pengeluaran komponen hotel dan restoran di tahun 2020. Meski demikian upaya penanganan pandemi Covid-19 yang intens sehingga kasus Covid-19 terkendali berdampak mulai membaiknya pengeluaran konsumsi pada komponen tersebut, dengan pertumbuhan yang positif di tahun 2021.



Tabel 3.8 Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga (persen), 2020-2024

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-0,46	1,62	4,95	5,61	5,58
a. Makanan dan Minuman	3,33	1,81	4,59	4,73	4,43
b. Pakaian	1,04	0,34	2,93	2,95	2,17
c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	0,57	0,32	1,01	6,05	4,44
d. Kesehatan dan Pendidikan	3,82	0,21	2,11	1,90	4,34
e. Transportasi dan Komunikasi	-5,06	3,11	8,63	7,88	8,17
f. Restoran dan Hotel	-6,07	0,56	5,33	6,24	6,93
g. lainnya	0,21	0,18	1,91	2,06	1,94

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Pertumbuhan konsumsi (riil) dapat menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (*volume*) dari waktu ke waktu. Pada komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, semua kelompok konsumsi mengalami peningkatan, termasuk kelompok pengeluaran transportasi dan komunikasi serta restoran dan hotel mulai mengalami peningkatan setelah kontraksi di tahun 2020. Setelah mengalami kontraksi, pengeluaran transportasi dan komunikasi memiliki nilai pertumbuhan tertinggi selama tiga tahun terakhir pada komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, yaitu sebesar 8,63 persen pada tahun 2022, 7,88 persen pada tahun 2023 dan sebesar 8,17 persen pada tahun 2024.



Tabel 3.9 Pertumbuhan Indeks Implisit Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga (persen), 2020-2024

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	0,68	1,79	4,71	3,53	3,11
a. Makanan dan Minuman	0,03	3,98	5,66	5,56	5,72
b. Pakaian	3,39	1,42	2,87	1,84	1,71
c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	0,93	1,25	2,76	1,86	1,50
d. Kesehatan dan Pendidikan	-1,98	3,14	1,90	0,94	1,19
e. Transportasi dan Komunikasi	0,96	-2,14	5,19	2,85	1,33
f. Restoran dan Hotel	0,06	3,92	5,26	2,27	1,88
g. lainnya	6,14	2,69	6,02	3,14	3,27

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tingkat perubahan indeks harga penggunaan konsumsi akhir rumah tangga secara implisit atau *current time* disajikan dalam Tabel 3.9. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa secara umum peningkatan harga pada kelompok konsumsi akhir rumah tangga cukup berfluktuasi. Setelah mengalami perlambatan dari tahun 2019 hingga 2020, namun kembali mengalami percepatan di tahun 2022, termasuk komponen transportasi dan komunikasi, yang sudah meningkat sebagai dampak berakhirnya pembatasan mobilitas akibat pemberlakuan PPKM.

3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Peranan konsumsi akhir LNPRT dalam PDRB menurut pengeluaran masih sangat kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya, yaitu hanya sekitar 1 persen saja. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah masih perlu ditingkatkan lagi. Beberapa lembaga



yang memberikan andil cukup besar untuk PKLNPR di Kabupaten Kendal adalah organisasi kemasyarakatan (ormas), partai politik, dan lembaga keagamaan.

Tabel 3.10 Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rp)	427,22	446,44	503,40	567,02	686,40
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	268,59	271,95	285,21	312,44	367,69
Distribusi Persentase PDRB ADHB (Persen)	1,00	0,99	1,01	1,04	1,17
Laju Pertumbuhan ADHK (Persen)	-2,19	1,25	4,87	9,55	17,68
Indeks Implisit	159,06	164,16	176,50	181,48	186,68
Laju Implisit	1,64	3,21	7,52	2,82	2,86

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Dari Tabel 3.10, dapat dilihat pertumbuhan konsumsi LNPRT cenderung meningkat dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2020 karena adanya pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan konsumsi LNPRT sebesar -2,19 persen. Meskipun begitu, pada tahun 2021, konsumsi LNPRT mulai mengalami perbaikan dengan pertumbuhan sebesar 1,25 persen dan sebesar 4,87 persen pada tahun 2022. Pada tahun 2023 konsumsi LNPRT meningkat tinggi sebesar 9,55 persen didorong oleh persiapan kontestasi pemilihan umum tahun 2024. Puncak pertumbuhan konsumsi LNPRT terjadi pada tahun 2024 meningkat sebesar 17,68 persen didorong pemilihan umum tahun 2024.



3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan konsumsi akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kabupaten Kendal serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian di bawah ini.

Tabel 3.11 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Miliar Rp)	2.074,34	2.138,40	2.170,48	2.288,99	2.368,75
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	1.275,33	1.285,79	1.288,01	1.319,12	1.351,31
Distribusi Persentase terhadap PDRB ADHB	4,87	4,73	4,37	4,21	4,03
Laju Pertumbuhan					
Total konsumsi pemerintah	-4,13	0,82	0,17	2,42	2,44

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah tahun 2021 mulai mengalami peningkatan, setelah mengalami penurunan di tahun 2020, baik untuk nilai atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2019, total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku sebesar 2,17 triliun rupiah. Pada tahun 2020, mengalami penurunan menjadi 2,07 triliun rupiah, namun sejak tahun 2021 hingga 2024 terus mengalami peningkatan. Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah pada tahun 2024 menjadi 2,37 triliun rupiah. Hal yang sama juga terjadi pada konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, mengalami peningkatan hingga tahun 2019, kemudian mengalami penurunan di tahun 2020, namun mengalami peningkatan kembali di tahun 2021



hingga tahun 2024. Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (ADHK 2010) pada tahun 2024 sebesar 1,35 triliun rupiah.

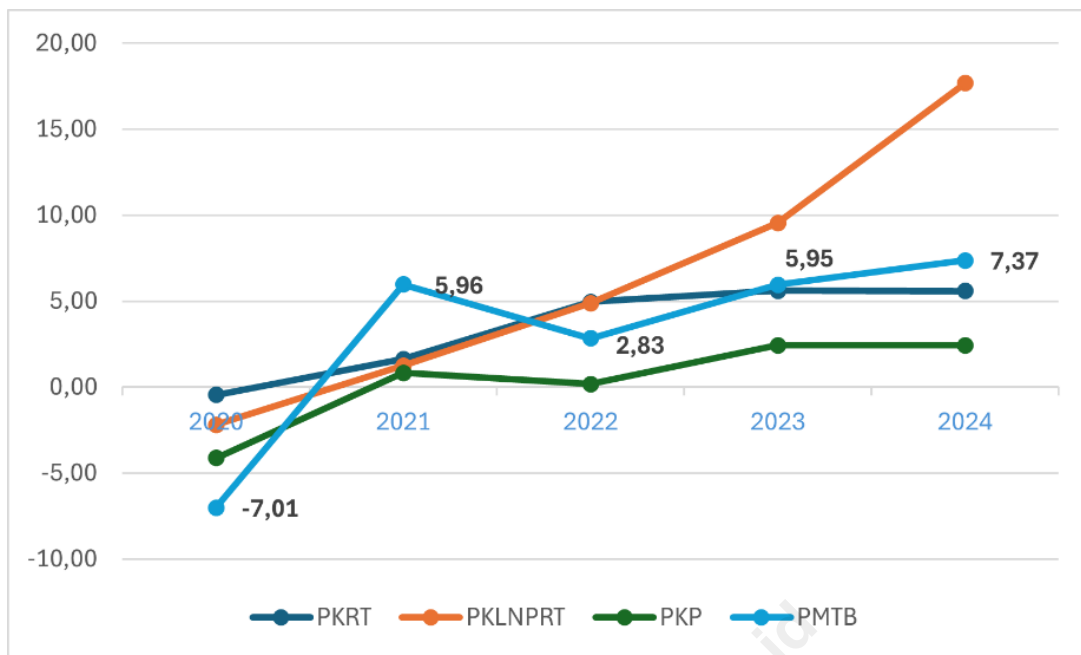
Menarik untuk dicermati lebih lanjut proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB pada lima tahun terakhir mengalami penurunan. Persentase konsumsi pemerintah terhadap PDRB pada tahun 2020 adalah 4,87 persen, terus menurun hingga tahun 2024 menjadi 4,03 persen.

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan dari tahun 2020-2024. Pertumbuhan konsumsi pemerintah mengalami perlambatan di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Setelah itu kembali mengalami peningkatan di tahun 2021 sebesar 0,82 persen dan mengalami perlambatan kembali di tahun 2022 sebesar 0,17 persen. Pada tahun 2023 hingga 2024 pertumbuhan konsumsi pemerintah meningkat sebesar 2,42 persen dan 2,44 persen.

3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dalam PDRB menurut pengeluaran lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). PMTB dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)¹. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect-input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

¹Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor



Gambar 3.3 Pertumbuhan Beberapa Komponen Pengeluaran di Kabupaten Kendal (persen), 2020-2024

Nilai PMTB menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil dari tahun 2020 sampai 2024. Pada tahun 2024, nilai PMTB ADHB adalah 15,768 triliun rupiah dan nilai PMTB ADHK 2010 sebesar 9,616 triliun rupiah. Data pada Tabel 3.12 menjelaskan bahwa pertumbuhan PMTB pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -7,01 persen akibat adanya pandemi COVID-19, namun mengalami peningkatan kembali di tahun 2021 sebesar 5,96 persen seiring dengan telah selesainya pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, pembuatan tanggul dan normalisasi saluran sungai serta pembangunan pabrik dan fasilitas di Kawasan Ekonomi Khusus Kendal. Kemudian mengalami perlambatan kembali di tahun 2022, sebesar 2,83 persen, namun di tahun 2023 mengalami percepatan lagi dengan pertumbuhan sebesar 5,95 persen. Pertumbuhan PMTB di tahun 2024 mencapai 7,37 persen dan merupakan pertumbuhan tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Distribusi persentase atau kontribusi pengeluaran komponen PMTB terhadap nilai total PDRB dalam kurun waktu 2020-2024 menunjukkan kecenderungan menurun. Pada tahun 2020 distribusi PMTB sebesar 27,62 persen menjadi 26,80 persen pada tahun 2024.

**Tabel 3.12 Perkembangan dan Struktur PMTB, 2020-2024**

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	11.760,18	12.587,74	13.443,36	14.359,06	15.768,10
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	7.758,58	8.220,63	8.453,12	8.956,33	9.616,53
Distribusi Persentase PDRB ADHB (Persen)	27,62	27,87	27,07	26,41	26,80
Laju Pertumbuhan ADHK (Persen)	-7,01	5,96	2,83	5,95	7,37
Indeks Implisit	151,58	153,12	159,03	160,32	163,97
Laju Implisit	0,01	1,02	3,86	0,81	2,27

Catatan:* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk "persediaan" berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud di sini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif artinya terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif artinya terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).



Tabel 3.13 Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	447,83	408,28	511,24	553,21	426,35
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	300,08	221,45	270,63	283,29	214,28
Distribusi Persentase PDRB ADHB (Persen)	1,05	0,90	1,03	1,02	0,72

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis lebih rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih dalam. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah proporsi, dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Proporsi perubahan inventori terhadap PDRB mengalami fluktuasi namun kontribusinya dalam kurun waktu lima tahun terakhir tidak pernah lebih dari 2 persen. Pada tahun 2024 proporsinya sebesar 0,72 merupakan proporsi terendah selama lima tahun terakhir, sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2020 yaitu sebesar 1,05 persen.

3.7 PERKEMBANGAN EKSPOR NETTO BARANG DAN JASA

Ekspor netto antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor-impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-



impor antar provinsi dan kabupaten/kota menjadikan komponen ini (dalam series PDRB tahun dasar 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara total PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu, ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda “positif” berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar daripada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya, apabila bertanda “negatif” berarti nilai ekspor antar daerah lebih kecil daripada impor antar daerah.

Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor antar daerah menjadi nilai ekspor antar daerah dan nilai impor antar daerah dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode cross-hauling. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitungan ekspor impor dengan metode cross-hauling diawali dengan metode *commodity balance*. Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) dalam keseimbangan *demand* dan *supply* suatu perekonomian.

Dari Tabel 3.14 berikut dapat dilihat gambaran ekspor dan impor antar daerah, yaitu ekspor Kabupaten Kendal ke kabupaten/kota lain serta impor dari kabupaten/kota lain ke Kabupaten Kendal. Nilai net ekspor atas dasar harga konstan terlihat bahwa nilai ekspor antar daerah selalu lebih besar dibanding impornya, sehingga net ekspor antar daerah selalu positif dari tahun ke tahun. Begitu pula dengan nilai net ekspor atas dasar harga berlaku juga menunjukkan hal yang sama. Selama kurun waktu 2020-2024 nilai ekspor daerah cenderung lebih besar dari nilai impornya, sehingga net ekspor antar daerah bertanda positif. Hal ini menggambarkan bahwa nilai barang/jasa yang dikirim keluar Kabupaten Kendal lebih tinggi dari barang/jasa yang didatangkan ke Kabupaten Kendal.



Tabel 3.14 Perkembangan Ekspor Netto, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor Netto					
a. ADHB (Miliar Rp)	2.630,41	3.468,31	4.334,17	5.217,40	5.430,11
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	3.545,52	4.051,30	4.679,80	4.929,94	5.078,45

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara



PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020-2024





IV

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB KABUPATEN KENDAL

Data statistik sangat diperlukan untuk melihat sejauh mana pencapaian pembangunan di suatu wilayah. Data statistik juga diperlukan untuk memonitor dan mengevaluasi strategi dan kebijakan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Demikian halnya dengan data PDRB, berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari data PDRB. Berikut ini disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis PDRB menurut pengeluaran, berdasarkan informasi dan data yang tersedia.

4.1 PDRB KABUPATEN KENDAL

Nilai PDRB nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 mencapai 58,84 triliun rupiah, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 54,36 triliun rupiah. Perekonomian Kabupaten Kendal dari sisi pengeluaran digerakkan oleh semua komponen yang sebagian besar tumbuh positif, meliputi konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumahtangga, konsumsi pemerintah, PMTB, dan ekspor netto antar daerah.

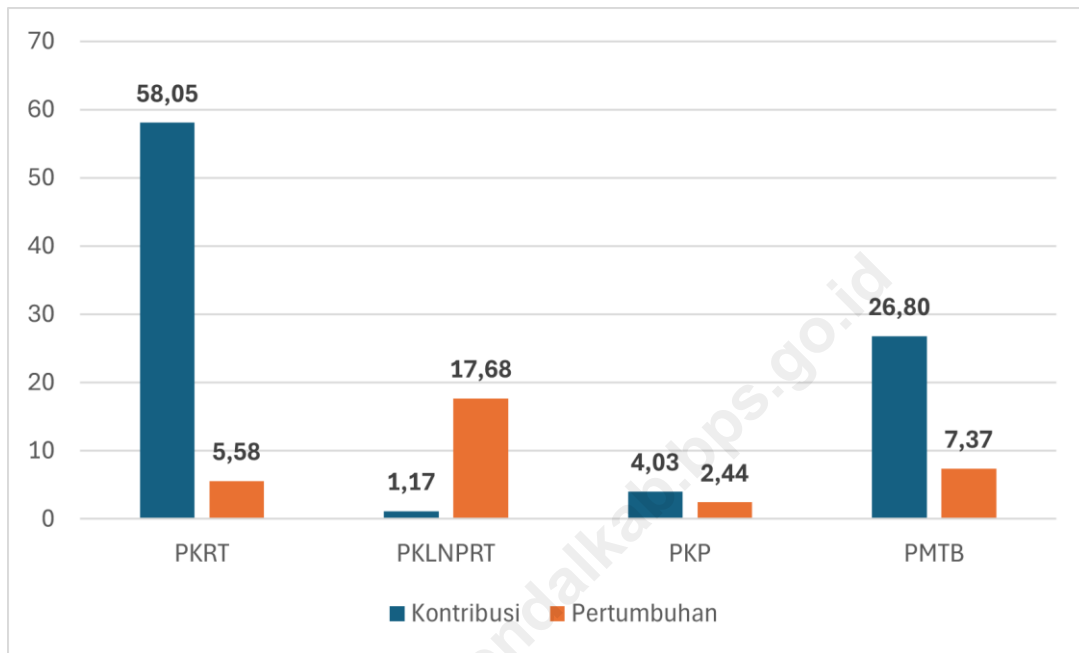
Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB riil pada tahun 2024 juga mengalami peningkatan, menjadi 37,20 triliun rupiah dari 35,29 triliun rupiah pada tahun 2023. Peningkatan nilai PDRB dari sisi pengeluaran menunjukkan perekonomian Kabupaten Kendal cukup kuat di tengah kondisi isu ketidakpastian perekonomian global.

4.2 STRUKTUR PEREKONOMIAN

Secara struktur ekonomi, komponen penyusun nilai PDRB menurut pengeluaran yang paling dominan adalah konsumsi rumah tangga dengan



kontribusi 58,05 persen di tahun 2024. Selain konsumsi rumah tangga, PMTB atau investasi juga menunjukkan peranan yang besar dengan kontribusi 26,80 persen. Peran komponen net ekspor cenderung meningkat, dengan kontribusi 9,23 persen pada tahun 2024. Peningkatan peran net ekspor memberi gambaran bahwa pasar ekonomi Kabupaten Kendal mampu menjangkau pangsa pasar di luar wilayah Kendal dengan cukup baik.

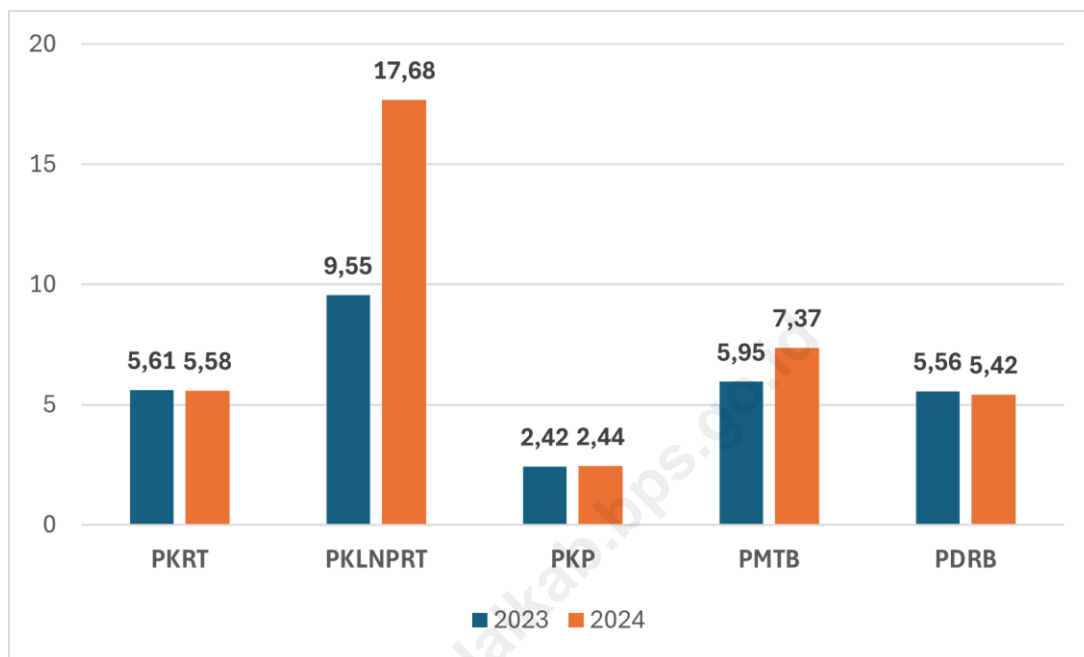


Gambar 4.1 Kontribusi dan Pertumbuhan Komponen PDRB Menurut Pengeluaran di Kabupaten Kendal (persen), 2024

Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT), pengeluaran konsumsi LNPRRT (PKLNPRRT), dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami laju pertumbuhan di atas pertumbuhan total PDRB pada tahun 2024. Konsumsi pemerintah (PKP) meningkat namun laju pertumbuhannya di bawah pertumbuhan total PDRB.

Selama kurun waktu 2020-2024, pertumbuhan komponen PMTB menunjukkan angka yang menggembirakan. Pertumbuhan yang cukup tinggi dicapai pada kurun waktu tersebut. Hal ini sejalan dengan adanya proyek-proyek nasional seperti pembangunan kawasan industri di KIK (Kawasan Industri Kendal) yang telah naik peringkat menjadi KEK (Kawasan Ekonomi Khusus), pembangunan

jalan tol maupun infrastruktur lainnya. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan PMTB mengalami perlambatan yang cukup tinggi hingga -7,01 persen akibat pandemi Covid-19, yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan PDRB secara keseluruhan.

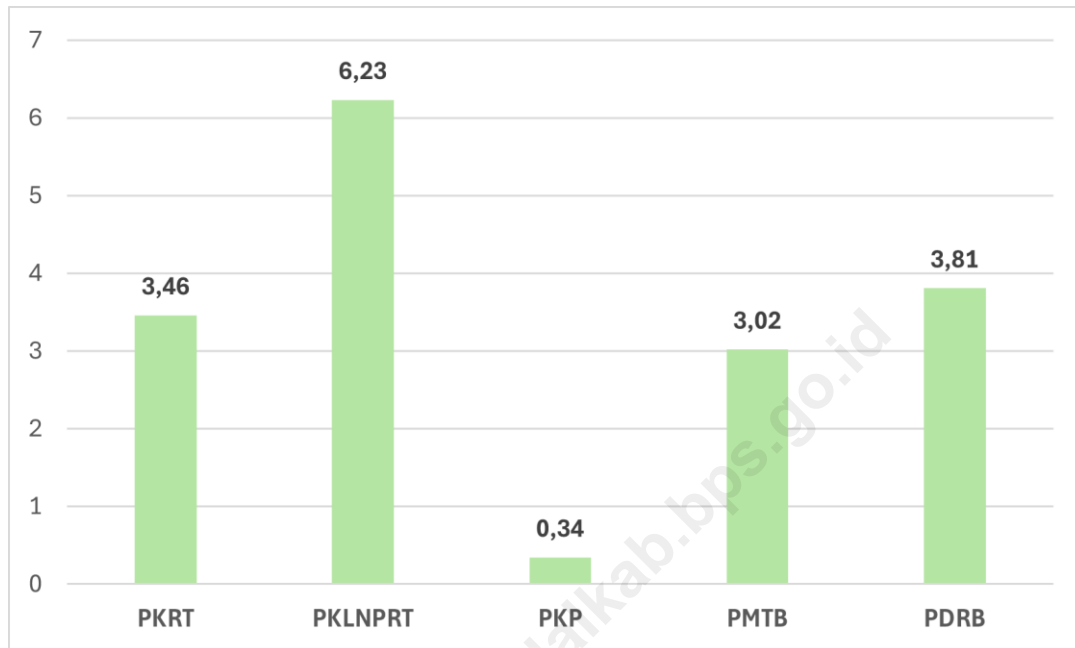


Gambar 4.2 Perbandingan Pertumbuhan Komponen PDRB Menurut Pengeluaran di Kabupaten Kendal (persen), 2023-2024

Pertumbuhan komponen-komponen PDRB Pengeluaran Kabupaten Kendal tahun 2024 hampir semuanya lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2023. Konsumsi LNPRT mengalami pertumbuhan paling tinggi. Pertumbuhan pada komponen LNPRT mulai meningkat sejak tahun 2016, kemudian mencapai puncak dalam kurun waktu lima tahun terakhir pada tahun 2019. Hal ini dipicu oleh pelaksanaan pemilu presiden maupun legislatif di tahun itu. Namun pada tahun 2020, laju pertumbuhan LNPRT juga mengalami perlambatan hingga -2,19 persen kemudian kembali meningkat di tahun 2021 dan 2022 sebesar 1,25 persen dan 4,87 persen. Kemudian pada tahun 2023 komponen LNPRT meningkat lagi sebesar 9,55 persen menjelang pemilihan umum tahun



2024. Puncaknya pada tahun 2024, pertumbuhan konsumsi LNPRT mencapai 17,68 persen didorong oleh pemilihan umum 2024. Secara rata-rata dalam kurun waktu lima tahun terakhir pertumbuhan komponen LNPRT lebih tinggi dari pertumbuhan komponen lainnya, seperti terlihat pada Gambar 4.3.



Gambar 4.3 Rata-rata Pertumbuhan Komponen PDRB Menurut Pengeluaran di Kabupaten Kendal (persen), 2020–2024

4.3 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Dari Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Kabupaten Kendal digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.



**Tabel 4.1 Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB,
2020-2024**

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar)	25.246,21	26.115,63	28.699,31	31.378,72	34.157,27
Total PMTB (ADHB) (Miliar)	11.760,18	12.587,74	13.443,36	14.359,06	17.768,10
Perbandingan Konsumsi RT thd PMTB	2,15	2,07	2,13	2,19	2,17

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Rata-rata rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB selama lima tahun terakhir lebih dari 2. Hal ini dapat diartikan bahwa penggunaan produk untuk konsumsi rumah tangga lebih dari 2 kali dibanding untuk PMTB. Walaupun nilai ini cenderung stabil selama lima tahun terakhir, namun polanya cenderung meningkat. Rasio terbesar pada tahun 2023 sebesar 2,19, kemudian menurun pada tahun 2024 menjadi 2,17. Penurunan rasio tersebut disebabkan peningkatan nominal PMTB yang lebih tinggi dibandingkan peningkatan nominal konsumsi rumah tangga.

4.4 PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPR, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.



Tabel 4.2 Proporsi Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar)					
a. Rumah Tangga	25.246,21	226.115,63	28.699,31	31.378,72	34.157,27
b. LNPRT	427,22	446,44	503,40	567,02	686,40
c. Pemerintah	2.074,34	2.138,40	2.170,48	2.288,99	2.368,75
Jumlah	27.747,77	28.700,47	31.373,19	34.234,73	37.212,42
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	42.586,19	45.164,80	49.661,96	54.364,40	58.836,99
Proporsi	65,16	63,55	63,17	62,98	63,25

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Secara rata-rata lebih dari 63 persen produk barang dan jasa yang berada di wilayah domestik Kabupaten Kendal digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir. Dalam kurun waktu lima tahun proporsi ini relatif stabil, dalam rentang 63-65 persen. Sedangkan produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir, yaitu PMTB dan net ekspor memiliki peran yang relatif kecil, berkisar 37 persen.

4.5 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".



Formula:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Dimana:

I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit.

Data pada Tabel 4.3 berikut menunjukkan besaran ICOR selama kurun waktu lima tahun terakhir yaitu 2020-2024 berkisar antara 4 hingga 7, kecuali tahun 2020 saat pandemi melanda berdampak signifikan pada nilai ICOR hingga berada pada nilai minus 16,60. Nilai ICOR tertinggi terjadi pada tahun 2021 mencapai 6,95 sedangkan terkecil pada tahun 2022 sebesar 4,70. Semakin tinggi nilai ICOR menunjukkan semakin besar kapital yang digunakan untuk dapat meningkatkan 1 unit nilai output.

Tabel 4.3 Incremental Capital Output Ratio (ICOR), 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (Miliar)	30.449,02	31.632,28	33.428,96	35.287,70	37.201,45
Perubahan (Miliar)	-467,36	1.183,25	1.796,68	1.858,74	1.913,75
PMTB (ADHK 2010) (Miliar)	7.758,58	8.220,63	8.453,12	8.956,33	9.616,53
ICOR	-16,60	6,95	4,70	4,82	5,03

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara



Pada tahun 2020, ICOR bernilai minus, data menunjukkan bahwa sebagian barang modal kemungkinan dijual, rusak atau non aktif sedangkan barang modal yang tersedia tidak mampu menghasilkan output bahkan mengurangi output, akibat pembatasan yang diberlakukan pada masa pandemi. Penerapan kebijakan PSBB di awal pandemi menyebabkan sebagian besar perusahaan memutuskan untuk melepas beberapa aset untuk bertahan dan menggaji karyawan. Setelah masa PSBB berakhir aktivitas produksi kembali berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan dan perbaikan ICOR menunjukkan hasil yang positif di tahun 2021 yaitu sebesar 6,95 tertinggi selama kurun waktu 5 tahun terakhir, yang berarti pada tahun 2021 PMTB yang terbentuk belum secara efisien menambah PDRB. Sedangkan pada tahun 2022 hingga 2024 nilai ICOR menurun menjadi 4,70; 4,82 dan 5,03 yang menunjukkan kinerja PMTB menjadi lebih baik dalam menambah nilai PDRB.



P E N U T U P



1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2020-2024 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Kendal pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Nominal PDRB Kabupaten Kendal tahun 2024 atas dasar harga berlaku mencapai 58,84 triliun rupiah. Dari nilai PDRB tersebut sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir, yaitu konsumsi rumah tangga, LNPRT dan pemerintah yang mencapai 63,25 persen dimana konsumsi rumah tangga sendiri mencapai 58,05 persen. Dengan peranan konsumsi rumah tangga yang sangat dominan, tidak dapat dipungkiri bahwa komponen pengeluaran ini adalah penopang dan penggerak utama pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal. Tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal mencapai 5,42 persen, sedangkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga mencapai 5,58 persen.
3. Pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga tumbuh paling tinggi diantara komponen pengeluaran lainnya, dengan pertumbuhan mencapai 17,68 persen di tahun 2024. Pertumbuhan ini didorong oleh pelaksanaan pemilihan umum 2024.
4. Pengeluaran konsumsi pemerintah menunjukkan kecenderungan meningkat dalam lima tahun terakhir. Pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah pada tahun 2024 sebesar 2,44 persen merupakan pertumbuhan tertinggi komponen ini dalam periode tahun 2020-2024.



5. Peranan investasi dalam perekonomian merupakan topik yang menarik untuk diulas, karena investasi dalam bentuk kapital/modal fisik akan digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi yang keluarannya adalah output. Peranan investasi dalam PDRB Pengeluaran Kabupaten Kendal dapat didekati dari proporsi PMTB dalam PDRB. Proporsi PMTB ini berada pada kisaran 26-28 persen, atau secara rata-rata 27,15 persen. Nilai ICOR Kabupaten Kendal dalam lima tahun terakhir mulai menurun, sehingga dapat disimpulkan bahwa investasi yang ditanamkan menjadi lebih efisien dalam menambah 1 unit output PDRB.
6. Selama periode 2020-2024, nilai net ekspor barang dan jasa Kabupaten Kendal bernilai positif atau terjadi surplus perdagangan yaitu nilai ekspor lebih besar dari nilai impor. Surplus perdagangan Kabupaten Kendal menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2024 proporsinya adalah 9,23 persen terhadap total PDRB.



DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pusat Statistik, *Sistem Neraca Nasional 2008*, Jakarta, 2013.
2. _____, *Pedoman Penyusunan PDRB Kabupaten/Kota Tahun Dasar 2010 Menurut Pengeluaran*, Jakarta, 2014.
3. _____, *Booklet Perubahan Tahun Dasar PDB Berbasis SNA 2008*, Jakarta, 2014.
4. _____, *Produk Domestik Bruto menurut Penggunaan 2008-2013*, Jakarta, 2014
5. BPS Provinsi Jawa Tengah , *Tabel Input Output Jawa Tengah*, berbagai seri, Semarang.
6. _____, *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*, berbagai seri, Semarang.
7. _____, *Beberapa Indikator Makro Sosial Ekonomi Jawa Tengah*, berbagai seri, Semarang.
8. _____, *Kabupaten Kendal dalam Angka*, berbagai seri, Kendal.
9. _____, *Statistik Air Bersih Jawa Tengah*, berbagai seri, Semarang.
10. _____, *Statistik Impor Jawa Tengah*, berbagai seri, Semarang.
11. _____, *Statistik Industri Manufaktur Besar Sedang Jawa Tengah*, berbagai seri, Semarang.
12. _____, *Statistik Ekspor Jawa Tengah*, berbagai seri, Semarang.

LAJU PERTUMBUHAN PDRB MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN KENDAL 2024** (PERSEN)

** : Angka Sangat Sementara



LAJU
PERTUMBUHAN
PDRB

5,42

PENGELUARAN KONSUMSI
RUMAH TANGGA

5,58

PENGELUARAN KONSUMSI
LEMBAGA NON PROFIT

17,68

PENGELUARAN KONSUMSI
PEMERINTAH

2,44

PEMBENTUKAN MODAL
TETAP BRUTO

7,37





<https://kendalkab.bps.go.id>

L A M P I R A N



**Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kendal Atas Dasar Harga
Berlaku Menurut Pengeluaran (miliar rupiah), 2020-2024**

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*)	2024**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	25.246,21	26.115,63	28.699,31	31.378,72	34.157,27
1.a. Makanan dan Minuman	9.687,44	10.255,09	11.332,81	12.528,76	13.832,09
1.b. Pakaian	1.145,03	1.165,21	1.233,70	1.293,37	1.344,05
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	3.506,15	3.561,26	3.696,43	3.993,25	4.233,02
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	1.688,49	1.745,09	1.815,71	1.867,62	1.971,86
1.e. Transportasi dan Komunikasi	6.586,45	6.646,13	7.594,29	8.426,46	9.236,46
1.f. Restoran dan Hotel	2.124,13	2.219,73	2.461,20	2.674,28	2.913,42
1.g. lainnya	508,52	523,12	565,18	594,96	626,37
2. Konsumsi LNPRT	427,22	446,44	503,40	567,02	686,40
3. Konsumsi Pemerintah	2.074,34	2.138,40	2.170,48	2.288,99	2.368,75
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	11.760,18	12.587,74	13.443,36	14.359,06	15.768,10
5. Perubahan Inventori	447,83	408,28	511,24	553,21	426,35
6. Net Ekspor	2.630,41	3.468,31	4.334,17	5.217,40	5.430,11
PDRB PENGELUARAN	42.586,19	45.164,80	49.661,96	54.364,40	58.836,99

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara



Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kendal Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (miliar rupiah), 2020-2024

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*)	2024**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	17.300,93	17.581,17	18.452,18	19.486,57	20.573,18
1.a. Makanan dan Minuman	6.120,81	6.231,31	6.517,37	6.825,80	7.128,35
1.b. Pakaian	918,63	921,78	948,76	976,72	997,91
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	2.465,54	2.473,41	2.498,42	2.649,63	2.767,32
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	1.232,73	1.235,31	1.261,38	1.285,36	1.341,12
1.e. Transportasi dan Komunikasi	4.734,83	4.882,11	5.303,29	5.721,39	6.188,91
1.f. Restoran dan Hotel	1.469,64	1.477,87	1.556,70	1.653,86	1.768,50
1.g. lainnya	358,75	359,39	366,26	373,81	381,08
2. Konsumsi LNPRT	268,59	271,95	285,21	312,44	367,69
3. Konsumsi Pemerintah	1.275,33	1.285,79	1.288,01	1.319,12	1.351,31
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	7.758,58	8.220,63	8.453,12	8.956,33	9.616,53
5. Perubahan Inventori	300,08	221,45	270,63	283,29	214,28
6. Net Ekspor	3.545,52	4.051,30	4.679,80	4.929,94	5.078,45
PDRB PENGELUARAN	30.449,02	31.632,28	33.428,96	35.287,70	37.201,45

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kendal Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (persen), 2020-2024

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*)	2024**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	59,28	57,82	57,79	57,72	58,05
1.a. Makanan dan Minuman	22,75	22,71	22,82	23,05	23,51
1.b. Pakaian	2,69	2,58	2,48	2,38	2,28
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	8,23	7,89	7,44	7,35	7,19
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	3,96	3,86	3,66	3,44	3,35
1.e. Transportasi dan Komunikasi	15,47	14,72	15,29	15,50	15,70
1.f. Restoran dan Hotel	4,99	4,91	4,96	4,92	4,95
1.g. lainnya	1,19	1,16	1,14	1,09	1,06
2. Konsumsi LNPRT	1,00	0,99	1,01	1,04	1,17
3. Konsumsi Pemerintah	4,87	4,73	4,37	4,21	4,03
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	27,62	27,87	27,07	26,41	26,80
5. Perubahan Inventori	1,05	0,90	1,03	1,02	0,72
6. Net Ekspor	6,18	7,68	8,73	9,60	9,23
PDRB PENGELUARAN	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara



**Lampiran 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar
Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (persen), 2020-2024**

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*)	2024**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	-0,46	1,62	4,95	5,61	5,58
1.a. Makanan dan Minuman	3,33	1,81	4,59	4,73	4,43
1.b. Pakaian	1,04	0,34	2,93	2,95	2,17
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	0,57	0,32	1,01	6,05	4,44
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	3,82	0,21	2,11	1,90	4,34
1.e. Transportasi dan Komunikasi	-5,06	3,11	8,63	7,88	8,17
1.f. Restoran dan Hotel	-6,07	0,56	5,33	6,24	6,93
1.g. lainnya	0,21	0,18	1,91	2,06	1,94
2. Konsumsi LNPRT	-2,19	1,25	4,87	9,55	17,68
3. Konsumsi Pemerintah	-4,13	0,82	0,17	2,42	2,44
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-7,01	5,96	2,83	5,95	7,37
PDRB PENGELUARAN	-1,51	3,89	5,68	5,56	5,42

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Lampiran 5. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (Tahun
2010=100) Kabupaten Kendal Menurut Pengeluaran, 2020-2024**

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*)	2024**)
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Konsumsi Rumah Tangga	145,92	148,54	155,53	161,03	166,03
1.a. Makanan dan Minuman	158,27	164,57	173,89	183,55	194,04
1.b. Pakaian	124,65	126,41	130,03	132,42	134,69
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	142,21	143,98	147,95	150,71	152,96
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	136,97	141,27	143,95	145,30	147,03
1.e. Transportasi dan Komunikasi	139,11	136,13	143,20	147,28	149,24
1.f. Restoran dan Hotel	144,53	150,20	158,10	161,70	164,74
1.g. lainnya	141,75	145,56	154,31	159,16	164,36
2. Konsumsi LNPRT	159,06	164,16	176,50	181,48	186,68
3. Konsumsi Pemerintah	162,65	166,31	168,51	173,52	175,29
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	151,58	153,12	159,03	160,32	163,97
5. Perubahan Inventori	149,24	184,37	188,91	195,28	198,97
6. Net Ekspor	74,19	85,61	92,61	105,83	106,92
PDRB PENGELUARAN	139,86	142,78	148,56	154,06	158,16

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara



Lampiran 6. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (Tahun 2010=100) Kabupaten Kendal Menurut Pengeluaran (persen), 2020-2024

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*)	2024**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	0,68	1,79	4,71	3,53	3,11
1.a. Makanan dan Minuman	0,03	3,98	5,66	5,56	5,72
1.b. Pakaian	3,39	1,42	2,87	1,84	1,71
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	0,93	1,25	2,76	1,86	1,50
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	-1,98	3,14	1,90	0,94	1,19
1.e. Transportasi dan Komunikasi	0,96	-2,14	5,19	2,85	1,33
1.f. Restoran dan Hotel	0,06	3,92	5,26	2,27	1,88
1.g. lainnya	6,14	2,69	6,02	3,14	3,27
2. Konsumsi LNPRT	1,64	3,21	7,52	2,82	2,86
3. Konsumsi Pemerintah	-0,40	2,25	1,32	2,97	1,02
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	0,01	1,02	3,86	0,81	2,27
PDRB PENGELUARAN	1,62	2,09	4,05	3,70	2,66

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KENDAL**

JL. Pramuka Komplek Perkantoran Kendal, 51351 Telp. (0294) 381461
Email : bps3324@bps.go.id Homepage : <http://kendalkab.bps.go.id>